



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015

Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran (TA) 2015 secara ringkas disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel III.1
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2015

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1 Pendapatan dan Belanja			
Pendapatan	1.454.838.128.297,00	1.432.159.651.029,00	(22.678.477.268,00)
Belanja & Transfer	1.753.919.457.572,00	1.494.447.291.801,80	(259.472.165.770,20)
Surplus/(Defisit)	(299.081.329.275,00)	(62.287.640.772,80)	236.793.688.502,20
2 Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	340.850.066.897,00	342.065.873.521,00	1.215.806.624,00
Pengeluaran Pembiayaan	41.768.737.622,00	41.768.737.622,00	-
Pembiayaan Netto	299.081.329.275,00	300.297.135.899,00	1.215.806.624,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	238.009.495.126,20	238.009.495.126,20

Berdasarkan Tabel III.1 diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp1.432.159.651.029,00 lebih kecil 1,56 persen dibandingkan dengan yang dianggarkan sebesar Rp1.454.838.128.297,00;
2. Belanja dan Transfer Daerah Tahun Anggaran 2015 dapat direalisasikan sebesar Rp1.494.447.291.801,80 Atau lebih kecil 14,79 persen dibandingkan dengan yang telah dianggarkan yaitu sebesar Rp1.753.919.457.572,00;
3. Realisasi APBD TA 2015 menunjukkan Defisit sebesar Rp62.287.640.772,80, sedangkan pada Pembiayaan terdapat pembiayaan netto sebesar Rp300.282.135.899,00 sehingga memunculkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp238.009.495.126,20.

Dengan menggunakan anggaran sebagai tolok ukur Kinerja Keuangan, SiLPA TA 2015 berasal dari Sisa Anggaran Pendapatan sebesar Rp22.678.477.268,00 ditambah Belanja dan Transfer yang tidak terserap sebesar Rp259.472.165.770,20 dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1.215.806.624,00.



3.1.2 Realisasi TA 2015 Dibandingkan dengan TA 2014

Tabel III.2
Perbandingan Realisasi TA 2015 dengan TA 2014

	Realisasi		TA 2015-TA 2014	
	2015 (Rp)	2014 (Rp)	RP	%
1 Pendapatan dan Belanja				
Pendapatan	1.432.159.651.029,00	1.277.145.669.965,00	155.013.981.064,00	12,14
Belanja & Transfer	1.494.447.291.801,80	1.220.323.640.367,00	274.123.651.434,80	22,46
Surplus/(Defisit)	(62.287.640.772,80)	56.822.029.598,00	(119.109.670.370,80)	(209,62)
2 Pembiayaan				
Penerimaan Pembiayaan	342.065.873.521,00	297.208.756.864,00	44.857.116.657,00	15,09
Pengeluaran Pembiayaan	41.768.737.622,00	26.263.969.000,00	15.504.768.622,00	59,03
Pembiayaan Netto	300.297.135.899,00	270.944.787.864,00	29.352.348.035,00	10,83
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	238.009.495.126,20	327.766.817.462,00	(89.757.322.335,80)	(27,38)

Tabel III.2 menunjukkan Perbandingan Realisasi Tahun Anggaran 2015 dengan Tahun Anggaran 2014 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pendapatan TA 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan TA 2014 sebesar Rp155.013.981.064,00 atau 12,14 %;
2. Belanja dan Transfer TA 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan TA 2014 sebesar Rp274.123.651.434,80 atau 22,46%;
3. Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kabupaten Wonosobo memperoleh surplus anggaran Rp56.822.029.598,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2015 mengalami defisit sebesar Rp62.287.640.772,80
4. Pembiayaan Netto mengalami peningkatan Rp29.352.348.035,00 atau 10,83% sedangkan SiLPA mengalami penurunan Rp89.757.322.335,80 atau 27,38% dibandingkan dengan TA 2014.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

1. Hambatan Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan, baik DAK, Bagi Hasil Pajak/Bukan pajak maupun DAU, bagian terbesar dari dana perimbangan tersebut berasal dari DAU.

Sementara itu meskipun upaya-upaya optimalisasi pendapatan telah dilakukan namun kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih relatif kecil. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah sehingga perlu pemecahan yang tepat. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan sudah terlihat dari semakin meningkatnya realisasi pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun, namun demikian masih perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan PAD tanpa harus menaikkan tarif pajak dan retribusi yang dapat memberatkan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta solusi yang dapat ditempuh adalah :

- a. Menumbuhkan kesadaran bagi para wajib pajak dan wajib retribusi untuk membayar pajak/retribusi tepat waktu serta penegakan peraturan perundangan



perpajakan dan retribusi daerah, agar masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara jujur dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melalui :

- 1) Sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pajak dan retribusi daerah;
 - 2) Penagihan pajak secara persuasif;
 - 3) Pemeriksaan dan pemantauan terhadap pembukuan wajib pajak;
 - 4) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi/pihak yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak yang belum sesuai dengan potensi dan menjadi hak pemerintah daerah, upaya yang dilakukan melalui peningkatan koordinasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Provinsi.
- c. Guna terus meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya dibidang pajak dan retribusi daerah telah ditempuh langkah-langkah antara lain :
- 1) Melakukan penggalian potensi-potensi pendapatan daerah, mengintensifkan siklus pendataan sampai dengan penarikan, pendataan ulang WP dan WR;
 - 2) Melakukan pengawasan yang baik kepada petugas penarik/pemungut serta memberikan sanksi kepada WP dan WR yang tidak memenuhi kewajibannya.

2. Hambatan Pencapaian Target Belanja.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Hal ini berarti bahwa APBD disusun tidak saja berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, melainkan juga harus disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah. Secara umum permasalahan belanja daerah adalah adanya ketidakseimbangan kebutuhan belanja daerah dengan kemampuan pendapatan daerah yang direncanakan. Kemudian disisi lain tingkat penyerapan belanja dari tahun ketahun tetap sekitar 80% sehingga berakibat sisa anggaran yang besar, hal ini disebabkan berbagai masalah antara lain jumlah paket pekerjaan yang banyak tetapi tidak sebanding dengan jumlah SDM yang menangani paket pekerjaan tersebut, waktu pelaksanaan pekerjaan tidak cukup disebabkan banyak kegiatan dalam proses lelang gagal, ataupun ketentuan peraturan yang turun terlambat pada beberapa jenis kegiatan yang dananya dibiayai dari pusat.

3. Hambatan Pengelolaan Pembiayaan Daerah.

Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan daerah adalah terbatasnya sumber-sumber pembiayaan daerah untuk dapat menutup defisit anggaran daerah, sementara apabila pada sisi pembiayaan pengeluaran daerah terdapat kewajiban pemerintah daerah untuk pelunasan pinjaman daerah.



4. Hambatan Dalam Pengelolaan Barang Daerah.

Pengelolaan barang daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi sangat penting barang daerah atau aset tetap dapat dikelola dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi beberapa hal menjadi hambatan antara lain karena jumlah fisik aset tetap yang banyak sehingga membutuhkan ketelitian dan ketekunan, kapasitas SDM pada SKPD kurang memadai terkait dengan kemampuan dan kemauan serta permasalahan teknis lainnya yang membutuhkan komitmen kita bersama agar pengelolaan barang menjadi semakin baik.